



Sembilan Kursi untuk Korban Blankspot

Berdasarkan Jarak, Hanya Bisa Pilih Satu Sekolah

JOGJA - Ombudsman RI Perwakilan DIJ mendatangi Dinas Pendidikan Kota Jogja, kemarin (20/7). Kedatangan mereka menindaklanjuti aduan dari Sekretariat Bersama (Sekber) Pos Pengaduan PPDB DIJ tentang nasib siswa korban blankspot, sekaligus membahas dan mencari solusinya.

Dari pertemuan itu Disdik Kota Jogja mengambil diskresi dengan memberikan kesempatan para siswa ini. Yakni memanfaatkan sembilan kursi kosong yang masih tersedia di SMP negeri.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Edy Heri Suasana mengatakan, mekanisme pendaftaran bagi siswa-siswa ini bukan dengan sistem PPDB. Bagi mereka berlakukan mekanisme baru. "Sebab PPDB sudah ditutup dan calon siswa hanya bisa memilih satu sekolah bukan lagi 16," ujarnya.

Pemberlakuan mekanisme ini tetap berpegang pada jarak dan sistem nilai tetap tidak berpengaruh. Edy juga mengatakan untuk mekanisme baru ini hanya bisa di pakai oleh siswa yang pernah mendaftar namun tidak diterima dan siswa yang belum mendaftar ke SMP Negeri mana pun.

Bagi siswa korban blank spot yang hendak mendaftar diwajibkan untuk membawa membawa bukti NEM asli dan bukti verifikasi pendaftaran di SMP negeri. Tujuannya agar dapat diketahui bahwa siswa tersebut belum mengikuti daftar ulang di SMP negeri manapun. "Mekanismenya hanya berlaku secara offline," tegasnya.

Edy juga akan menugaskan kepala sekolah yang masih memiliki kursi kosong untuk memberikan pengumuman dan menyediakan formulir di sekolahnya. Untuk siswa korban blankspot juga diharapkan bisa hadir di Gedung Heritage Dinas Pendidikan, Senin (23/7). Mulai jam

08.00 sampai 12.00. Agar bisa kami lakukan pengolahan data," tambah Edy.

Sedangkan untuk jumlah rincian kursi kosong dan posisi sekolah akan ditampilkan di web Dinas Pendidikan Kota Jogja.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIJ Budhi Masthuri mengatakan, pihaknya akan terus memantau mekanisme baru bagi siswa korban blankspot yang akan mendaftar. Untuk saat ini ada dua orang yang sudah melapor dan akan dibantu agar bisa diterima di sekolah negeri. Budhi juga berharap mekanisme yang masih menggunakan sistem jarak ini bisa adil bagi siswa-siswa korban blankspot lain. (cr5/din/er)

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui



CARI SOLUSI: Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Edy Heri Suasana (kiri) menerima anggota Ombudsman RI Perwakilan DIJ, kemarin (20/7). SETIAWI A. KUSUMA/RADAR JOGJA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Forpi			

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005